

Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi Simpan Pinjam di Desa Pengurung Kabupaten Kaur

Samsul Akmal ¹⁾; By Kasdi ²⁾

^{1,2)} Jurusan Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu (STIA) Bengkulu

Email: ¹⁾ akmalsakad4f@gmail.com; ²⁾ bykasdi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Desember 2021]

Revised [22 Januari 2022]

Accepted [28 Januari 2022]

KEYWORDS

*Effect of Participation,
Success, Cooperative*

*This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license*



ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Untuk mengukur keberhasilan koperasi perlu adanya uji partisipasi dan uji pasar, kedua uji tersebut menggambarkan bahwa koperasi harus memiliki potensi keunggulan bersaing dengan yang lain. Meningkatkan kemampuan dan peran koperasi di Desa Pengurung kecamatan kinal kabupaten kaur. yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, dan kepentingan anggota pada khususnya

ABSTRACT

With the development of business activities, so that the management of cooperatives is carried out professionally, it will be even greater. Professional management requires the existence of a good accountability system and relevant and reliable information for decision-making in planning and controlling cooperatives. One of these efforts is the development of the information system needed to grow cooperatives through accounting, in particular formulating financial accounting standards for cooperatives in the preparation of their financial statements. To measure the success of cooperatives, it is necessary to have a participation test and a market test, both of which illustrate that cooperatives must have a potential competitive advantage with others. capacity building and the role of cooperatives in Pengurung Village, Kinal District, Kaur Regency. in accordance with the interests of society in general, and the interests of members in particular..

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut adalah : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (Nurmala,2012).

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Nurmala,2012).

Umumnya permasalahan koperasi disebabkan karena partisipasi anggota dalam koperasi yang masih rendah, pengelolaan manajemen koperasi yang buruk, kurangnya permodalan dan pembinaan perkoperasian yang masih rendah dari kuantitas maupun kualitas.

LANDASAN TEORI

Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan

serta dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama yang dilandasi dengan prinsip koperasi.

1. Tujuan Koperasi. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
2. Prinsip-prinsip Koperasi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.25 1992, prinsip koperasi adalah sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan bersifat demokratis.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota.
 - d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
 - e. Kemandirian.
 - f. Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian.
 - g. Kerjasama antarkoperasi.
 - h. Kepedulian terhadap masyarakat
3. Jenis-Jenis Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan tersebut maka muncul jenis-jenis koperasi yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya dan koperasi berdasarkan keanggotaannya sebagai berikut :
 - a. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya
Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi :
 - b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.
 - c. Koperasi Serba Usaha (KSU)
Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, dan unit wartel.
4. Koperasi Konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga.
5. Koperasi Produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
6. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya. Secara Umum, berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah sebagai berikut :
 - a. Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
 - c. Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggungjawab, dan kejujuran.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1990:3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah "penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati ". Sedangkan menurut Arikunto (1998:122) metode deskriptif adalah "suatu penelitian yang maksudnya tidak menggunakan hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang satu variabel atau gejala-gejala tertentu

Dengan demikian penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran, deskripsi dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi faktual dan akurat mengenai potensi dan kendala peningkatan pendapatan
Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat kecamatan kinal. yang bernama Azwar St Sati dengan usia 53 tahun yang berkaitan dengan:

- Potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli
- Kendala dalam meningkatkan pendapatan
- Upaya untuk meningkatkan pendapatan

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen, buku- buku dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini. Seperti halnya di Nagari Bayur Dokumen yang dapat dilihat yaitu peraturan-peraturan nagari keputusan wali nagari yang berkaitan dengan pendapatan asli nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Yang Dimiliki Nagari Bayur Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.

Mewujudkan sebuah nagari yang mandiri dan otonom serta bisa membiayai nagarinya sendiri, salah satu faktor penentunya adalah kemampuan nagari untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari dan Dana Alokasi Umum Nagari. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena selama penyelenggaraan pemerintahan desa, anak nagari telah kehilangan akses dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki (Pador, 2001:5). Oleh sebab itu menjawab permasalahan ini pemerintah telah mengatur agar harta kekayaan nagari yang dikelola pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten diatur kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan nagari. Mengenai potensi dari Nagari Bayur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, pendapatan asli nagari terdiri dari:

Hasil kekayaan nagari

Hasil kekayaan nagari yang terdapat di Nagari Bayur adalah berupa sawah yang disebut dengan tanah kas nagari. Tanah kas nagari yang banyaknya 84 sukat benih ± 7 Ha, belum terkelola dengan baik, hanya sebagian saja yang masuk ke kas Nagari, itupun tidak rutin. Keadaan ini menggambarkan bahwa Pemerintah Nagari Bayur tidak mampu memanfaatkan potensi yang sudah ada sebagai pendapatan asli nagari, seperti yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001, bahwa yang menjadi sumber pendapatan nagari adalah hasil kekayaan nagari, dimana di Nagari Bayur yaitu berupa tanah kas nagari (sawah nagari). Tanah kas nagari yang berupa sawah sampai hanya tahun 2003 saja yang bisa di buat laporannya, sebab dari tahun 2004 sampai 2006 tidak ada yang masuk ke kas nagari. Situasi ini terjadi karena ketidak mampuan wali nagari sebagai pemimpin nagari dalam memberdayakan sumber yang sudah ada, kurangnya inisiatif pemerintah nagari untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dan karena kualitas SDM Nagari yang minim untuk mencari alternatif serta inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli nagari. Keadaan ini telah berlangsung lama, sehingga dikawatirkan Nagari Bayur akan sangat tergantung dengan bantuan dari pemerintah daerah, untuk itu nagari dituntut untuk mampu mengupayakan sumber-sumber yang sudah ada maupun sumber lain agar dapat menjadi pendapatan asli nagari. Jadi penerimaan atau pendapatan Asli Nagari Bayur dari hasil kekayaan nagari sangat minim sekali.

a. Retribusi Nagari

Retribusi nagari yang ada di Nagari Bayur adalah retribusi pasar, namun sekarang dikelola oleh perorangan sehingga nagari tidak lagi menerima retribusi pasar. Kemudian pajak keberadaan *home stay* dan pajak permukaan air danau tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap nagari, karena tidak adanya peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari sehingga, tidak adanya satu tolak ukur untuk melakukan pungutan.

b. Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat

Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat yang ada di Nagari Bayur hanya berupa potensi dari perantau, namun itupun tidak dapat terkelola dengan baik sehingga keberadaan perantau yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi nagari, belum bisa menambah pendapatan asli nagari secara baik.

c. Iuran Nagari

Telah ditetapkan iuran tiap kepala keluarga sebesar Rp 3000/bulan, namun hal ini sesuai dengan Peraturan Nagari No 1 th 2003 tentang pungutan retribusi Nagari Bayur tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang mau membayarnya. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari serta tidak adanya tenaga yang profesional untuk merebut retribusi tersebut. Sehingga penerimaan nagari dari iuran nagari belum bisa meningkatkan pendapatan asli nagari.

Potensi pendapatan asli nagari dapat dilihat dari ilmu ekonomi, karena ini berkenaan dengan penerimaan. Dalam ilmu ekonomi peningkatan penerimaan merupakan bentuk pembangunan ekonomi dimana terkait dengan adanya sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan kelembagaan Hidayat (1979: 115).

Sehubungan dengan pendapat di atas maka untuk meningkatkan pendapatan asli nagari, maka Nagari Bayur membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta harus didukung oleh modal dan teknologi yang cukup untuk memberdayakan sumber yang ada maupun sumber lain yang belum tergalai. Dalam konsep pembangunan ekonomi, upaya peningkatan dapat dilakukan dengan pendayagunaan dan perluasan sumber yang ada (intensifikasi dan ekstensifikasi). Upaya intensifikasi berkaitan dengan pengambilan langkah-langkah tertentu untuk mengelola sumber yang sudah ada sehingga hasil yang didapat meningkat dibandingkan dengan hasil yang diterima sebelumnya. Intensifikasi dapat berupa penanaman modal, perbaikan manajemen, peningkatan mutu SDM dan peranan lembaga yang ada. Sedangkan ekstensifikasi merupakan upaya memperluas sumber penerimaan selain sumber yang telah ada. Upaya ekstensifikasi ini bisa berbentuk penambahan lahan dari kerja sama dengan pihak lain dalam pencarian sumber yang baru Djojohadikusumo (1994: 215).

Berdasarkan pendapat di atas, pemerintahan Nagari Bayur dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli nagari. Sumber yang sudah ada dapat ditingkatkan hasilnya, dan sumber yang belum dimanfaatkan selama ini dapat diusahakan agar penerimaan nagari yang berasal dari pendapatan asli nagari meningkat dibanding yang diterima atau yang tidak tergalai selama ini. Dengan kata lain sebagai sebuah nagari yang juga menerapkan sistem pemerintahan nagari, Nagari Bayur dapat melakukan usaha intensif untuk lebih meningkatkan penerimaan khususnya pendapatan asli nagari. Jadi, walaupun Nagari Bayur memiliki potensi pendapatan asli nagari yang cukup bagus, tetapi tidak bisa meningkatkan pendapatan asli nagari.

Kendala Yang Ditemui Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.

Pada umumnya kendala yang ditemui dalam meningkatkan pendapatan asli nagari yaitu berkenaan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). SDM Nagari yang handal tentunya akan memberikan solusi bagi peningkatan pendapatan asli nagari, sebab dengan adanya SDM nagari yang bermutu, berkualitas dan bertanggung jawab, dapat mengembangkan pendapatan asli nagari. Kualitas SDM sangat menentukan bagaimana keadaan pemerintahan nagari baik buruknya suatu pemerintahan itu tergantung kepada kemampuan pemimpinnya. Untuk mengelola nagari dan berusaha mencari solusi yang terbaik karena itu sangat dibutuhkan SDM yang berkualitas.

Nagari Bayur sangat membutuhkan sekali kualitas SDM yang baik dan handal, sebab potensi Nagari Bayur cukup banyak. Namun belum bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai pendapatan asli nagari. Sebagaimana Hamalik (2005:5) menjelaskan bahwa ciri-ciri SDM yang baik dan handal itu diantaranya adalah:

1. Memiliki kemampuan profesional dan kepribadian yang baik menghayati dan mengamalkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya
2. Memiliki mental kemandirian dan inovatif atau maju

3. Memiliki kemampuan mendayagunakan atau menciptakan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan bertindak berlandaskan sistem nilai dan moral etika bangsa

Berdasarkan pendapat di atas SDM Nagari Bayur belum mencerminkan ciri-ciri SDM yang baik dan handal, terutama dari aparaturnya pemerintahan nagari, sebab pemerintah nagari tidak mampu mengembangkan potensi pendapatan asli nagari yang ada di nagari sebagai penerimaan utama nagari, Nagari Bayur sampai saat ini masih menggantungkan diri kepada bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten. Hal ini sangat jelas sekali terlihat dengan tidak berhasilnya Pemerintah Nagari Bayur menjalankan peraturan nagari yang telah dibuatnya tahun 2003 tentang Retribusi Nagari Bayur, tidak adanya wali nagari mengkoordinir anggotanya dalam upaya peningkatan pendapatan asli nagari, tidak adanya inisiatif pemerintah nagari beserta lembaga lainnya untuk membuat peraturan yang bisa mengatur tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli nagari dan sikap wali nagari yang hanya menerima tanpa adanya usaha yang dilakukannya.

Untuk mewujudkan suatu nagari yang makmur dan sejahtera perlu dilakukan pembinaan terhadap sumber daya nagari. Oleh karena itu Nagari Bayur yang hanya memiliki SDM yang minim, maka perlu pembinaan terhadap kualitas SDMnya. Seperti yang dikemukakan oleh Maani (2001:7) "untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari perlu upaya pembelajaran dan pertumbuhan melalui pembinaan SDM nagari, baik SDM yang menjalankan tugas pemerintahan nagari (wali nagari dan perangkatnya) maupun SDM yang duduk sebagai pimpinan dan anggota BPAN. Membangun SDM nagari merupakan tugas yang membutuhkan waktu lama, dilakukan terus menerus dan berkesinambungan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah tingkat atasnya".

SDA termasuk menjadi salah satu kendala dalam peningkatan pendapatan asli nagari, SDA yang melimpah dapat membawa sebuah nagari kepada peningkatan, namun antara SDA dan SDM tidak dapat dipisahkan. Untuk mengelola SDA dibutuhkanlah SDM yang handal, berkualitas dan berdaya guna. Demikian halnya dengan Nagari Bayur, Sumber Daya Alamnya memang tidak terlalu banyak namun dengan SDMnya berkualitas tentunya SDA ini akan dapat dimanfaatkan menjadi potensi bagi pendapatan asli nagari begitu sebaliknya.

Selain kendala yang berkenaan dengan SDM dan SDA, juga terdapat kendala karena keterbatasan tenaga, lunturnya semangat bernagari serta kurangnya keinginan masyarakat untuk membangun nagari. Pembangunan nagari dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan nagari atas kemampuan sendiri untuk menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan lingkungannya. Sesuai dengan pendapat Kaho (1991:109) "Salah satu faktor pendukung keberhasilan pemerintah daerah adalah adanya partisipasi aktif masyarakat". Dengan demikian nagari akan berhasil, berkembang dan maju tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif semua pihak, baik aparaturnya pemerintahan nagari, lembaga nagari dan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang terdapat dalam meningkatkan pendapatan asli nagari pada umumnya terkait dengan SDM dan SDA disamping kendala-kendala lainnya. SDM nagari yang ada tidak memenuhi maka, SDA yang ada tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli nagari. SDM nagari yang dimaksud adalah SDM aparaturnya pemerintahan nagari, dan SDM masyarakat nagari. Di samping itu kendala lain yang dihadapi juga tidak adanya peraturan nagari yang mengatur tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai potensi pendapatan asli nagari sehingga, sulit melakukan pungutan serta kurangnya respon masyarakat terhadap pembangunan nagari, karena sosialisasi pemerintah nagari yang minim.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Nagari Bayur Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari

Berdasarkan temuan penelitian, upaya yang telah dilakukan Wali Nagari Bayur bersama dengan perangkat dan lembaga nagari lainnya yaitu hanya dengan membuat peraturan nagari. Dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Bayur peneliti menemukan bahwa wali nagari tidak ada melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli nagari, kecuali hanya membuat peraturan nagari tahun 2003 tersebut, namun peraturan itu tidak berjalan dengan semestinya bahkan pungutan yang telah ditetapkan dalam tahun 2003 tersebut tidak ada sama sekali memberi kontribusi terhadap kas nagari. Pemerintah Nagari Bayur hanya menunggu bantuan yang datang dari pemerintah kabupaten, dengan dana itulah pemerintah nagari dapat berkerja.

Dilain pihak, BPRN telah melakukan pendataan terhadap tanah kas nagari yang berupa sawah, namun setelah adanya pendataan ini tindak lanjutnya tidak ada. Sehingga hanya sampai 2003 saja yang masuk ke kas nagari, karena lemahnya kepemimpinan wali nagari, sehingga tidak mampu mengambil suatu tindakan yang efektif dan tegas.

Sedangkan dari tahun 2004 sampai sekarang tidak ada pemasukan bagi kas nagari. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah nagari Bayur bersama perangkatnya belum memperlihatkan peningkatan terhadap pendapatan asli nagari. Sehingga Nagari Bayur untuk menjalankan roda pemerintahannya sangat tergantung kepada dana bantuan dari pemerintah Kabupaten

Agam. Di samping itu adanya sumbangan dari perantau, itupun tidak rutin hanya apabila ada keinginan dari perantau tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Potensi pendapatan asli daerah desa pengurung cukup banyak diantaranya adalah dari pemamfaatan Desa wisata. Seperti tempat berkeramba bagi petani ikan, retribusi dari keberadaan bangunan *Home Stay*, pajak parkir, namun belum dikelola dan dikembangkan dengan baik.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah desa pengurung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan membuat Peraturan daerah diDesa pengurung No. I Tahun 2003 tentang Pungutan Retribusi daerah, namun peraturan daerah yang telah ditetapkan ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak adanya kerjasama yang baik diantara lembaga-lembaga yang ada di nagari sehingga sulit untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Disamping itu Badan Perwakilan Rakyat daerah juga telah melakukan pendataan terhadap aset daerah dalam hal ini. Namun pendataan terhadap sawah tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daaerah karena pendataan yang dilakukan oleh BPRN tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah
3. Adapun kendala yang ditemui dalam meningkat pendapatan asli daerah adalah:
 - a. Ketidak mampuan sebagai pemimpin daerah dalam memberdayakan sumber yang sudah ada.
 - b. Kurangnya inisiatif dari pemerintahan daerah
 - c. Ketidak mampuan aparatur pemerinta daerah menyampaikan aspirasi bersama ke tingkat kabupaten
 - d. Sulitnya memungut pajak karena belum adanya peraturan daerah yang dibuat.
 - e. Keterbatasan tenaga atau kurangnya personil pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan daerah yang mampu bekerja secara profesional
 - f. Mulai lunturnya semangat bernagari dalam kehidupan masyarakat.
 - g. Kurang kondusifnya hubungan lembaga-lembaga yang ada di daerah
 - h. Pengelola pasar tidak percaya dengan pemerintah daerah

Saran

1. Badan Perwakilan Rakyat Nagari sebaiknya dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, agar pemerintahan nagari dapat berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah nagari, kelembagaan nagari, dan masyarakat sebaiknya menciptakan kondisi yang dinamis dan saling bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan asli nagari..

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2008. Manajemen penelitian. Jakarta; Dekdikbud Dirjen Dikti.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 2004. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ikarar Mandiri Abadi
- Hamalik, Oemar. 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia (manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu). Jakarta; Bumi Aksara.
- Hidayat. 1979. Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Perkoperasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Strategik Mendasar). Paper di sampaikan dalam kongres LSEI VIII 15-17 Juni. Jakarta
- Kamal, Miko. 2001. Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaian. Makalah disampaikan pada workshop Tanah Ulayat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 23 -24 Oktober 2016.
- Kaho, Josef Riwu. 1. Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI. Jakarta.
- Maani, Karjuni Dt. 2006. Penerapan Konsep Balanced Scorecard Dalam Pemberdayaan Pemerintah Nagari . Jurnal Suluah Bendang, Vol V. No. I April 2006
- Moleong, Lexy. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; Remaja Rosda karya.
- Poerwadaminta. 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka.
- Wignosoebroto, S . 1998.Kebijakan Negara Untuk Mengakui Atau Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak- Hak Atas Tanah. Jurnal Masyarakat Adat No. 01, Juli 1998..